

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
2023**

**PERDA KABUPATEN PRINGSEWU NO.5, LD 2023/NO.178, NOREG (05-1415/PRS/2023), 11 HLM.  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampirin laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP 69 Tahun 2010; PP 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2023; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016; PERMENDAGRI 62 Tahun 2017; PERMENSOS No.9 Tahun 2018; PERMENPU-PR No.29/PRT/M/2018 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 20168; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 121 Tahun 2018; PERMENKES No. 4 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERDA Kabupaten Pringsewu No. 14 Tahun 2021; PERDA Kabupaten Pringsewu No. 1 Tahun 2022; PERDA Kabupaten Pringsewu No. 5 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Agustus 2023.
- Lamp.: 25 Hlm.